

PROBING: BERKEDAULATAN RAKYAT DENGAN HIKMAT

Purwo Santoso
Universitas Nadhatul Ulama Yogyakarta
email: psantoso@ugm.ac.id

ABSTRAK

Sebagai ajaran, demokrasi sangatlah ambisius. Demokrasi menjadikan yang dikuasai, yang menerima mandat kekuasaan menjadi pemerintah. Rakyat jelata sebagai pemilik kekuasaan, yang secara kultural nyaman dalam posisi sebagai hamba sahaya, harus berganti posisi dan peran: penentu pilihan bagi pihak yang menguasainya. Dalam kesadaran bahwa rakyat mengelola kedaulatan dengan caranya sendiri dan proses-proses untuk mengaktualisasikan kedaulatannya (*discursive design*), cara berkerakyatan/berkedaulatan itu adalah dengan mengawal berlakunya kebijakan untuk bijak (*meta-policy*).

Kata Kunci: *berkedaulatan rakyat, Ilmu Pemerintahan, khidmat*

ABSTRACT

As a teaching, democracy is very ambitious. Democracy makes the ruled, who receives the mandate of power in government. The common people as owners of power, who are culturally comfortable in the position of servants, must change positions and roles: determining the choice of those who control them. In the awareness that the people manage their sovereignty in their own way and the processes for actualizing their sovereignty (*discursive design*), the democratic / sovereign way is to guard the enactment of policies to be wise (*meta-policy*).

Keywords: *people's sovereignty, government science, solemn*

Informasi Artikel

Diterima: Oktober 2020, **Disetujui:** November 2020, **Dipublikasikan:** Desember 2020

DOI: <https://doi.org/10.47431/governabilitas.v1i2.88>

PENDAHULUAN

Perihal Hikmat Kebijaksanaan

Kita semua telah sangat terbiasa dengan *quote* di atas. Namun entah mengapa saya mengatakan kutipan tersebut sebagai suatu yang *klise*. Bisa jadi, para pembaca jurnal ini juga memiliki anggapan yang sama. Jangan-jangan, terdapat problematika kronis tidak disadari

dalam pendidikan Ilmu Pemerintahan, yang menjadikan kealpaannya dalam memahami pemerintahan di negerinya, justru menjadi alasan untuk abai kalau tidak angkuh.

Dalam *quote* yang diambil dari naskah konstitusi itu, ada frase yang terasa aneh di telinga: 'kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan'. Namun kejanggalan yang lebih akut adalah kalau yang merasakan kejanggalan itu adalah ilmuwan mengaku-aku sebagai ahli pemerintahan. Apakah *the founding fathers* negara ini orang aneh, memasukkan ide aneh dalam naskah konstitusi. Kemungkinan besar, yang aneh adalah ilmuwan pemerintahan sendiri, terkunci mata hatinya karena begitu seriusnya tampil ilmiah tanpa hikmat.

Ajaran untuk hikmat dalam tradisi pembelajaran di perguruan tinggi, boleh dibilang nihil. Terminologi 'hikmat' biasa dipakai untuk mengkomunikasikan fenomena keagamaan/spiritual. Literatur yang kita baca dan metodologi keilmuan yang kita adopsi sangat mengedepankan rasionalitas sehingga: (1) berkhidmat kepada publik/negeri, dan (2) dan mengambil hikmah hal baik, namun berada diluar koridor keilmuan. Sepertinya kita asyik menekuni paham populer bahwa Ilmu Pemerintahan kita pelajari untuk bisa tampil di jurnal-jurnal ilmiah dan disitir sebanyak mungkin pakar, bukan untuk menjadikan negeri yang rumit ini semakin *governable*. Kondisi ini justru terjadi karena pretensi kita perlu mengembangkan ilmu yang bebas nilai, menjadikan Indonesia kesulitan menanamkan nilai-nilai, termasuk nilai demokrasi. Dalam pretensi mengembangkan ilmu yang bebas nilai, kita justru kesulitan untuk berempati, termasuk berempati kepada warga negara dalam bernegara. Justru karena keperluannya untuk menghasilkan proposisi-proposisi yang terukur, lalu hal-hal yang sulit diukur dianggap tidak ada, tidak relevan. Secara ringkas, kita-kira menyatakan, untuk berilmu jangan berperasaan. Kecintaan pada tanah air, karena melibatkan unsur perasaan, tidak boleh dicampurbaurkan dengan telaah ilmiah. Diam-diam kita yang menekuni Ilmu Pemerintahan ini mengandaikan urusan hikmat itu ada di bawah otoritas keagamaan. Asumsinya, demi keilmiahannya, Ilmu Pemerintahan harus diisolasi dari ajaran agama.

Untuk menghindari dari kontroversi yang lebih pelik, saya perlu tegaskan bahwa telaah dalam naskah ini bukanlah kebenaran ajaran agama. Yang diperagakan di sini adalah paralelitas beragama dan berilmu. Bagimu negeri, Ilmu Pemerintahan kami. Dalam paralelitas itu tidak ada salahnya kalau ilmuwan pemerintahan berniat mengkaji, sambil

bersandar pada metodologi yang sah, juga menyediakan diri untuk dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. *The founding father* memberi isyarat bahwa, agar Ilmu Pemerintahan bermanfaat bagi (perbaikan) penyelenggaraan pemerintahan di negeri ini, hasil-hasil kajiannya bisa memimpin pemerintah ataupun rakyat (warganegaranya) mengambil hikmat kebijaksanaan. Namun, entah mengapa, terminologi atau konsep kebijaksanaan sudah jarang dipakai, dan konsep yang lebih disukai adalah kebijakan. Memang dalam bahasa Inggris perbedaannya dengan mudah diekspresikan, ada *policy* ataupun *policy-making* (kebijaksanaan) yang dengan mudah dibedakan dengan *wisdom* (kebijaksanaan). Maksudnya, secara diam-diam ilmuwan pemerintahan menarik diri dari amanah kerakyatan/kenegaraan: mewujudkan praktik pemerintahan yang bijaksana.

Penarikan mundur tersebut di atas sangat masuk akal, ketika Ilmu Pemerintahan merasa cukup mempertaruhkan eksistensinya pada tataran ontologis. Namun ironisnya, pengusung ilmu ini justru terjebak dalam pertengkaran yang tidak perlu. Sisa pertengkaran tersurat dalam curhat pemikir *cum* aktivis pemerintahan senior, Sutoro Eko Yunanto. Menurut beliau, Ilmu Pemerintahan yang digelutinya mengidap semacam "cacat identitas". Perdebatan ontologis yang berkepanjangan menghasilkan "kesepakatan" diam-diam bahwa Ilmu Pemerintahan bercorak: "anti pada politik, lupa pada hukum, dan enggan pada administrasi" (Sutoro Eko, 2020). Untuk keluar dari situ, digalanglah pemikiran yang mulai menyebut diri Mahzab Timoho dengan salah satu isu yang digeluti adalah governabilitas. Dalam melakukan telaah *governability*, setidaknya ada dua hal yang harus selalu dijadikan pertimbangan: (1) *viability* (masuk-akal tidaknya model yang dibahas), dan (2) *feasibility* (kelayakan untuk mewujudkannya). Betapapun indah/hebat tatanan yang *viable*, tidak akan bisa kita nikmati kalau tidak bisa kita mewujudkannya. Sebaliknya, betapapun tidak ideal tatanan yang ada, namun jika sejauh ini *feasible*, haruslah diterima apa adanya.

Untuk ikut hirau pada sisi governabilitas, ada baiknya kita berangkat dari kesenjangan antara studi tentang *policy* dengan studi tentang *wisdom*. Yang menjadikan kita tidak nyaman mengkaji kebijaksanaan adalah tuntutan untuk serba empirik dan terukur. Hal yang sama terjadi dalam studi hukum. Tuntutan untuk mewujudkan keadilan melalui hukum, justru terkendala oleh norma-norma dan kaidah hukum yang diberlakukan. Untuk itu, kita bisa berangkat dari premis-premis sederhana, berangkat keperluan membikin telaah yang isinya *viable* sekaligus *feasible*.

Pertama, bahwa sesuatu yang sudah berlangsung (sistem, lembaga, kultur) pada dasarnya hal yang *viable*, dan oleh karenanya *governable*. Kalaulah sesuatu tidak bisa dijelaskan secara spesifik/ekspisit rinciannya, namun terus-menerus berulang, cukuplah untuk menandainya sebagai hal yang *governable*. Terlepas dari *judgement* para ahli, Indonesia itu demokratis atau tidak, kalau pemerintahan itu tetap berlangsung dalam krisis, pemerintahan itu sebetulnya *governable*. Perubahan ke aras yang lebih ideal, justru mengharuskan kita mengungkap hal-yang secara tersirat, memahami hal yang belum terpahami. Dengan begitu, berbagai kerangka pikir atau metodologi yang sudah dikenal khazanah keilmuan bisa memimpin kita menuju hikmat. Dengan begitu khidmad keilmuan kita dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.

Kedua, dalam menjalani kehidupannya, masyarakat berpikir dan bertindak dengan menggunakan kerangka pikirnya sendiri. Kalau interaksi bisa dijalin terus-menerus, tentulah ada nalar yang disepakati atau sama-sama diacu. Istilah *discursive design* dalam telaah ini merujuk padanya (Dryzek, 1990). Musyawarah, dalam hal ini adalah interaksi dan saling beradaptasi/bertransformasinya desain-desain tersebut. Dalam konteks itu bisa dibayangkan adanya *policy* dalam *ber-policy* untuk mempolakan model *governance* tertentu.

BEREMPATI PADA RAKYAT DALAM BERKERAKYATAN

Secara aksiologis demokrasi bermaksud memuliakan rakyat, dan itu energi kemuliaan ini rakyat tercurah untuk menjadikan negara berada dalam kendalinya. Terbentang pertanyaan bagaimana rakyat memuliakan dirinya sendiri, dan dengan itu pemerintah ataupun pemerintahan ada dalam kendalinya. Hal itu menuntut ilmuwan pemerintahan untuk memastikan pancaideranya tetap terbuka.

Dalam mengikuti arahan Sutoro Eko Yunanto tersebut di atas, tulisan ini mencoba memberikan tekanan pada sisi aksiologis. Terlepas dari visi romantik demokrasi ini, kita menemukan kenyataan justru tidak mudah bahwa rakyat untuk mengatur dirinya sendiri, dan tidak ada alasan untuk optimistik bahwa demokrasi sebagai popular kontrol itu mudah diwujudkan. Telaah yang lebih berpijak pada sisi aksiologi ini bisa mengantarkan kita pada kesadaran bahwa yang lebih membutuhkan demokrasi sebetulnya tidak dibutuhkan rakyat. Yang membutuhkan demokrasi, bisa jadi, adalah negara. Negara perlu melegitimasi

penguasaan atas rakyat dengan cita demokrasi. Demokratisasi di negeri ini tidak kunjung tuntas, dan bisa jadi, tidak akan pernah tuntas.

Pertanyaan yang mengedepan adalah bagaimana rakyat berkerakyatan/ berkedaulatan. Daripada mencurahkan kedaulatan sebagai basis untuk bisa mengendalikan negara, lebih baik langsung mempersalahkan negara. Demokrasi sudah dikukuhkan sebagai hak, dan secara yuridis, negara sudah diposisikan penjamin terpenuhinya hak (*duty bearer*). Ditambah pula, ide dasar bahwa 'demokrasi itu adalah kerakyatan' sudah sangat populer yang menjadikan orang menerimanya begitu saja (*taking for granted*). Dalam popularitasnya itu, kedaulatan rakyat justru kehilangan makna. Ide tentang sentralitas rakyat itu bisa kehilangan signifikansi. Hilangnya tidak diratapi, tidak juga disyukuri. Oleh karena itu, studi ini mencoba untuk tidak menerimanya begitu saja. Ada dialog dengan diri sendiri yang, ada baiknya saya *share*.

Kita ini terbiasa melihat rakyat dari luar, seolah-olah kita ini bukan rakyat itu sendiri. Demi objektivitas pengkajian, kita harus berpretensi bahwa rakyat adalah realita objektif, dan harus dibayangkan berada di luar diri kita sendiri, meskipun kita adalah (bagian dari) rakyat itu sendiri. Jelasnya, kerakyatan harus diperlakukan sebagai eksternalitas dari setiap subjek warga negara pemilik negeri ini.

Di sinilah terdapat kejanggalan. Subjek yang berdaulat, yang mana atas namanya kedaulatan dijalankan, harus saya perlakukan sebagai objek. Artinya, kalaulah pada akhirnya mengatakan bahwa rakyat tidak kompeten memerankan diri sebagai pemegang kedaulatan, kesimpulan tentang inkompetensi itu justru berasal dari inkompetensi kita membayangkan cara masyarakat bermasyarakat. Dalam konteks ini, saya menyadari belum memenuhi kaidah yang pernah saya tetapkan sendiri bahwa ilmu sosial adalah ilmu tentang ke-kita-an. Justru pemilik kedaulatan saya perlakukan sebagai *liyan*.

Kekhawatiran telah me-*liyan*-kan pemilik negeri, pemilik kedaulatan ini sempat sirna barang sejenak ketika saya diingatkan oleh pelajaran tentang sistem politik. Bahwa realitas itu bisa dibayangkan sebagai tatanan sistemik, dan dalam keberlangsungan sistem itu ditandai oleh silang-menyilang aksi-reaksi. Persilangan-persilangan itu tidak berujung dan juga tidak berpangkal, justru karena sistem itu sendiri.

Saya merasa bahwa pihak yang berpandangan pesimistik adalah ilmuwan sendiri. Memang, dengan menerapkan kaidah berpikir sistemik ini saya sempat lega sejenak. Tetapi

tiba-tiba menyeruak pertanyaan, di mana posisi saya sebagai warga yang secara normatif berhak mengklaim hak, berkekuatan mengubah keadaan. Apakah sebagai warga negara, sebagai subjek pemilik kedaulatan di negeri ini, harus meninggalkan diri saya dalam silang-sengkarut yang dirapikan, dan dibungkus dengan istilah 'sistem politik'. Lagi-lagi, ada kerumitan yang bersumber pada metodologi yang dipakai oleh kalangan ilmuwan sendiri. Bahkan terdapat kecurigaan, istilah sistem itu sendiri lebih dimaksudkan untuk membantu penguasa supaya efektif memegang kendali atas rakyat, dari pada untuk mengoptimalkan rakyat dalam berkerakyatan. Yang jelas, dalam *system thinking*, yang menjadi kehirauan adalah relasi-relasi yang fungsional, dan subjek ataupun subjektifitas tidak dianggap sebagai persoalan penting.

Sepertinya, dalam kajian-kajian saya tekuni, saya terbiasa meliyankan orang-orang yang menjadi warga negara secara apa adanya. Lebih dari itu, saya pun harus meliyankan diri saya sendiri. Ketika telaah aksiologis terhadap kerakyatan dan kedaulatan rakyat ini diteruskan, semakin saya memergoki ironi. Bukankan faktanya, saya ini dosen—memegang jabatan akademik guru besar—yang banyak bergaul dengan elite lokal. Kalaulah saya tidak satu kelas dengan elit lokal itu sendiri, saya kan punya jejak dan kontribusi dalam kehidupan publik di negeri ini. Sejalan dengan itu, ada subjek-subjek lain yang tak terhitung yang juga punya kontribusi, dan mengambil manfaat dari domain publik. Dalam posisi sebagai dosen, jangan-jangan saya tidak bersungguh-sungguh memperlakukan warga negara yang ikut di kelas saya, sebagai warga negara? Jangan-jangan kolega-kolega sesama pengampu matakuliah kewarganegaraan melakukan kekhilafan metodologis yang sama, memperlakukan mahasiswa sekedar sebagai pembayar SPP, bukan sebagai warganegara sedang memperbaiki kewarganegaraannya. Singkat cerita, saya telah mengikhianati cita kepublikan yang harus saya geluti dalam kehidupan sehari-hari, karena entengnya komitmen aksiologis yang dibebankan kepada saya sebagai dosen.

Dalam kegalauan ini, sindiran Sutoro Eko Yunanto—bahwa kami ini hanya sok ingkar—harus saya camkan baik-baik. Faktanya, secara hukum, politik maupun administratif, negara Republik Indonesia ini diarsiteki tokoh-tokoh yang kita muliakan sebagai *the founding father*. Mereka telah mewariskan pesan yang sepertinya berada di luar pendar metodologis yang disepakati. Di sana ditegaskan bahwa dalam berkerakyatan itu kita

bersandar pada 'hikmat kebijaksanaan'. Namun masalahnya dalam Ilmu Pemerintahan yang saya geluti tidak pernah diajarkan metodologi 'mengambil hikmah'.

Bagaimana cara berkerakyatan ataupun berkedaulatan dengan hikmah? Kalau pijakan aksiologis dalam studi pemerintahan hendak diperkuat, harus diniatkan bahwa studi pemerintahan ini adalah studi(nya) rakyat. Amanat the *founding father* adalah menemukan 'hikmat kebijaksanaan', dan lokasi untuk menemukannya adalah 'permusyawaratan/perwakilan'. Untuk itu metodologi *lesson drawing* yang diterapkan dalam studi kebijakan bisa di-*mainstream*-kan. Dalam konteks ini, *governance* bisa dioperasionalkan *meta-policy* (kebijaksanaan untuk bijaksana). Untuk mengambil hikmat kita harus memilah hal-hal yang esensial, dan dengan keberpihakan pada hal yang lebih esensial, tertib sosial dalam berkedaulatan tetap terbayang dan *governable*. Dengan cara itulah telaah ini berusaha melakukan probing: bagaimana rakyat berkedaulatan.

Mengingat problem-problem metodologis tersebut di atas, telaah ini hanya bermaksud untuk *probling*. Inipun didasarkan pada keterlibatan (khitmad) saya sebagai salah satu Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada sejumlah pengalaman mengambil kebijaksanaan berdasarkan hikmat, dan pengalaman ini tidak tergantikan oleh riset yang dilakukan. Pelibatan diri ini dipandu oleh gagasan *action research*, meski tidak dijalani secara ketat. Meskipun terkesan sambil lalu, pengalaman yang didokumentasikan melalui naskah ini, percobaan tentang proses mengambil hikmat kebijaksanaan ini sangat jarang (untuk tidak mengatakan tidak pernah) dilakukan.

MEMBUKA PINTU HIKMAH: BERKERAKYATAN BERSAMA KYAI

Untuk bisa memperagakan cara memaknai frase dipimpin oleh hikmat, saya merasa perlu menarasikan subjek warganegara, saya sendiri. Dengan menjaga intersubjektivitas dalam memahami rakyat berkerakyatan, saya harus membuka mata bahwa ketika bernaung/dinaungi NU, identitas mereka berubah menjadi jamaah. *Sense* jamaah yang ada diri saya justru memudahkan saya paham bagaimana jamaah berjamaah, bagaimana konfigurasi politik jamaah digelar. Jelasnya, diksi 'berkerakyatan' dipakai bukan sekedar untuk tampil beda apalagi untuk membuat lebih rumit, melainkan agar telaah itu ini bisa sampai ke hati.

Memposisikan Diri dalam Panduan Hikmat Kebijaksanaan

Kepemimpinan, dalam konteks ini dibahas dalam konteks spesifik, tepatnya dalam pengelolaan kontrol kolektif dan kebersamaan jamaah. Di sinilah hikmat menjadi taruhan. Catatan berikut ini kiranya bisa menjelaskan. Suatu hari, KH Hasan Abullah (Katib Syuriah PWNU DIY, untuk selanjutnya saya sebut Pak Kyai) memanggil saya, mengajak untuk mendiskusikan permasalahan politik yang muncul secara periodik. Beliau menyebutnya 'musibah lima tahunan'. Istilah ini beliau pakai untuk menunjukkan keprihatinan terhadap munculnya permasalahan secara periodik, yang oleh sebagian masyarakat diglorifikasi sebagai 'pesta', tepatnya pesta demokrasi. Even yang dimaksudkan adalah pemilihan umum.

Ada dua narasi yang bersilangan: prihatin dan sukacita. Pak Kyai mengekspresikan keprihatinan pada saat publik pada umumnya sedang bersuka-cita mengusung wacana pesta demokrasi. Sebagai narasi dominan yang didukung secara luas, Pak Kyai tentu tidak dalam posisi untuk menghentikannya. Pesta yang dimaksudkan sejatinya adalah *game*, kontes adu banyak pendukung. Melalui KPU, negara menggelar narasi yang memungkinkan setiap warganya melampiaskan hasratnya untuk berdaulat. Yang jelas, ada *moral hazard* yang harus dicegah dan dimitigasi, manakala sebagian besar warga berpesta pora, lomba adu kuat/banyak pendukung.

Ketika memposisikan diri sebagai pengurus NU—di mana beliau adalah sentra kepemimpinan di level DIY—saya dengan jelas bisa merasakan nuansa musibah yang beliau maksudkan. Nuansa kontestasi yang menyelimuti jamaah, menjadikan kegiatan ke-NU-an tidak *feasible* untuk dilakukan. Sejumlah kegiatan harus dihentikan, sejumlah mekanisme direlakan disfungsi, memberi ruang bagi warga untuk ikut berpesta, tanpa harus ikut larut dalam pesta itu sendiri. Dari obrolan saat itu, muncullah kebutuhan. NU harus merumuskan dan menyepakati semacam kode etik atau tata-kelola jamaah. Elit NU diminta mencermati keadaan dan merumuskan respons-respons seperlunya. Dalam renungan saya, inilah yang korespons dengan istilah dipimpin oleh hikmat, dipimpin oleh akal sehat pemimpin jamaah.

Game yang sedang digelar atas nama demokrasi mengharuskan perumusan berbagai langkah mitigatif. Dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dalam konteks ini maknanya: merumuskan formula mitigasi dan menjalankannya posisi masing-masing sebagai pemimpin. Artinya 'langkah yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan' harus dibayar dengan merelakan kegiatan jamaah mengalami disfungsi. Bijaksana, dalam konteks ini maknanya adalah rela

membayar kebebasan—yang konotasi sufistiknya bebas melampiaskan hasrat—dengan susah payang namun diam-diam, menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar. Indonesia masih dalam *euphoria*, di samping menyederhanakan demokrasi sebagai kebebasan, batas artikulasi kebebasan itu sendiri masih sangat fleksibel.

Hal ini sebetulnya adalah penjabaran dari kaidah *ushul fiqh*, bahwa menghindari mudharat itu lebih utama dari pada mengejar manfaat. Yang hendak digarisbawahi di sini adalah bahwa hikmah itu didapatkan dari penguasaan dan pemberlakuan kaidah *ushul fiqh*. Kaidah inipun sebetulnya diajarkan dalam perkuliahan manajemen resiko, ataupun *rational choice*. Yang hendak digarisbawahi di sini adalah adanya alur narasi wacana (*discursive design*) (Dryzek, 1990) yang sama dalam kebermanfaatannya, namun beda dalam artikulasinya.

Dalam kasus di atas, hikmat itu bisa hadir dalam berbagai desain perwacanaan atau kerangka pikir. Hikmat dalam kasus itu justru sangat penting ketika jamaah NU asyik berpesta, mengumbar hasrat politik. Sementara narasi untuk berpolitik dengan mengumbar hasrat tidak realistis untuk diwujudkan saat itu. Narasi tentang demokrasi yang sedang *mainstream* di negeri ini, dan mungkin juga di seluruh dunia adalah, penjaminan hak untuk mengumbar hasrat.

Sampai di sini, bisa dicatat bahwa untuk artikulasi kedaulatan rakyat ada silang menyilang alur narasi perwacanaan. Yang menempati mendominasi alam pikir publik—yang dikompori oleh akademisi dan media, dan dinikmati para penjaja kekuasaan—adalah alur menang-kalah. Kalau berani *perform* dalam pemilihan, artinya berani untuk menang atau kalah. Untuk mudahnya, alur ini asyik dengan *performance*. Di luar persoalan kalah-menang, adalah sekedar persoalan ekses, dan ada begitu banyak ekses yang tidak dipikirkan. Maklum, namanya juga ekses. Hikmat yang diperlukan dalam konteks ini untuk merumuskan langkah antisipatif, dan mengelola dan memitigasi eskse itu. Jelasnya, tidak perlu hikmat untuk merumuskan cara memenangkan kontestasi. Hikmat diperlukan ketika semua kontestan memasuki ruang kontes, bahkan para penonton kontes ikut berperilaku sebagai kontestan. Dalam *game* yang kontestatif yang kita sebut pemilu, kontes dipimpin oleh organ-organ yang jelas nama/atributnya (KPU, tim pemenang, kandidat), tidak usah ditegaskan perlunya dipimpin oleh hikmat.

Istilah 'dipimpin oleh hikmat' lebih merujuk pada *performativity*, bukan pada *performance*. Yang dipentingkan bukan siapa yang kalah/menang, melainkan indah atau eloknya kontestasi. Bahwa kebersamaan jamaah adalah yang utama, dan justru karena keutamaannya itulah Pak Kyai mengajak untuk mengalah: membiarkan sejumlah program kerja tetap *underform*. Saat itulah saya lebih paham bahwa keikutsertaan warga *nadhliyin* dalam pemilihan umum harus dibayar dengan pembiaran sejumlah program kerja terbengkalai. Bahwa artikulasi kedaulatan melalui penggunaan hak memilih dan dipilih harus dijaga melalui kepemimpinan informal, dan kalau tidak dalam posisi formal untuk memutuskan, kontribusi sistemiknya tidak bisa disepelekan. Narasi di atas hanya untuk memberikan gambaran bagaimana kerakyatan berjalan di tengah rakyat. Di luar persoalan teknisitas kepemiluan ada kiprah publik yang dipimpin oleh hikmat, dengan menegakkan politik performatif.

Ketika *euphoria* berkebebasan politik atas nama demokrasi tidak kunjung reda, berbagai *moral hazard* bermunculan dan, repotnya lagi: tak kunjung reda. Langkah mitigatif yang diikhtiarkan, jelas tidak memadai. Dalam posisi sebagai bagian komunitas yang dilabeli atribut 'komisi saqofah' saya memiliki tugas periodik memitigasi konflik antar jamaah, ketika ke hadapan setiap warga NU terbuka hak untuk mencalonkan diri menjadi anggota DPD RI. Daerah pemilihan untuk pengisian jabatan ini adalah Provinsi, dan komisi saqofah mendapat amanah untuk memastikan adanya spesifikasi warga yang direstui NU, tepatnya diperbolehkan mengusung citra bahkan mengatasnamakan jamaah NU. Karena misi yang disepakati hanyalah sekedar mitigasi konflik, maka yang dilakukan dari waktu ke waktu "hanyalah" menyelenggarakan konvensi: menyepakati siapa saja orang-orang yang direstui. Alhamdulillah, misi terselenggara dan selalu ada tokoh NU yang duduk di kursi DPD. Hanya saja, ada sejumlah isu lain yang mengedepan. Perlu kiranya dilakukan semacam "*action research*", meski harus dilakukan secara diam-diam saya jalani sambil tetap berkhitmad pada jamaah NU. "Temuan" dari *action research* ini membantu kita memahami kita, bagaimana permusyawaratan/perwakilan menjadi basis untuk mendapatkan hikmat. Mari kita simak segmen berikut ini.

Permusyawaratan/Perwakilan

Jauh-jauh hari sebelum tibanya musibah musiman (pemilu) di tahun 2019, saya sempat mengadu ke pak Kyai. Dengan mengedepakan komitmen untuk tetap berkhidmad ke jamaah, mengalirkan kemasygulan saya terhadap langkah minimalis dalam mengambil hikmat. Kita tahu, satuan hitung dalam penyelenggaraan pemilu adalah individu, dan individu ini terbagi dua: pemegang hak pilih dan *counter-part*-nya: pengguna hak pilih. Dengan bersandar metode *rational choice*, langkah mitigatif tersebut di atas masih menyisakan ketidakadilan. Memang, ada begitu banyak warga yang berkhidmad di NU tanpa berhitung-hitung secara ikhlas atau *lillahi ta'ala*, tanpa mengkait-kaitkan dengan pilihan dalam pemilu. Dalam keikhlasannya itulah mereka tidak merasa diperlakukan tidak adil, ketika ada sekelompok orang yang diperkenankan mengatasnamakan jamaah. Mereka diberi "hak" untuk memobilisasi solidaritasnya sebagai jamaah, tanpa sedikitpun dipertanyakan kontribusinya kepada jamaah. Pengguna hak dipilih yang sudah mendapatkan rekomendasi, sepertinya paham bahwa dirinya telah memanen nama NU tanpa harus repot-repot merawat dan membesarkan NU. Untuk itu cukuplah didistribusikan recehan kepada siapa-siapa yang sepatasnya diberi ucapan terima kasih. Saya membayangkan jamaah NU adalah suatu entitas modal sosial, dan dalam entitas ini tidak ada hubungan yang jelas antara penanam modal dan pemanfaat modal.

Dengan nalar kalkulatif *a la rational choice* inilah saya mencoba-coba menawarkan pemikiran ini sebagai hikmat. Percobaan dimulai dengan *curhat* bernada provokasi: "Sebagai khodimnya [pelayan] para Kyai, saya tetap semangat untuk berkhidmat Pak Kyai. Hanya saja, saya tidak rela NU dijual eceran. Kalaulah dijual, seyogyanya ya *grosiran*". Seingat saya, kira-kira begitulah redaksi *curhat* saya. Setelah itu ada berbagai dinamika yang berlangsung, namun apa yang saya maksudkan dengan 'dijual grosiran' itu berkesesuaian dengan langkah-langkah penatakelolaan jamaah.

Untuk menyongsong penyelenggaraan Pemilu 2019, diputuskan bahwa NU DIY tidak hanya menyepakati siapa-siapa yang diberi rekomendasi. Dengan diksi 'diberi rekomendasi', maknanya pemegang rekomendasi diberi kesempatan untuk memanen lumbung suara NU, namun sebagai jamaah NU sendiri pasif. Kalaulah ada jual-beli dukungan hal itu berlangsung pada level individual tokoh. Nah, dengan diksi 'dijual grosiran' NU sebagai jamaah dikondisikan untuk melakukan konsolidasi. Prosedur kelembagaan ditempuh sedemikian

sehingga ada figur yang secara syah dinobatkan sebagai representasi NU untuk maju ke pemilihan anggota DPD RI.

Karena kader sebelumnya menjabat dirasa harus memberi kesempatan kepada kader baru, maka ditemukanlah figur kyai muda dari Pondok Krapyak untuk diberi amanah sebagai representasi NU. Beliau adalah Hilmi Muhammad yang lebih populer dengan Gus Hilmi, seorang kyai muda berpendidikan doktor, Syuriah PWNU DIY yang juga cucu ulama besar Kyai Ali Maksum. Dari latar belakang ini, beliau adalah figur yang kalaulah saat itu belum terkenal, namun elektabilitasnya relatif mudah untuk diolah. Meski demikian kader lama tetap diberi kesempatan untuk mencalonkan diri, dan senyatanya memang mencalonkan diri, dengan kesepakatan beliau tampil sebagai individu warga negara. Singkat cerita, beliau terpilih menjadi anggota DPR RI dengan urutan perolehan suara kedua terbesar setelah GKR Hemas, yang dari waktu ke waktu mengantongi sekitar separo suara pemilih DPD di provinsi ini. Penting dalam telaah ini, sebetulnya bukan kemenangan Gus Hilmi semata. Yang sebetulnya lebih penting adalah dualitas kerja permusyawaratan/ perwakilan. Bahwa permusyawaratan dan perwakilan adalah dua sisi dari mata kedaulatan rakyat. Dengan dipimpin oleh hikmat, bukan sekedar hasrat untuk meraup suara terbesar kedua, NU menemukan jalan yang lebih lebar untuk tampil menjalankan fungsi-fungsi dan pelayanan-pelayanan publik. Bagi saya pribadi, yang melebihi itu semua, adalah jamaah yang tergalang dalam ormas besar ini keluar dari jebakan politik eceran.

Ketika diselenggarakan pemilihan DPD RI untuk yang pertama kali, penggalangan dukungan dari komunitas NU memang menghasilkan kemenangan bagi Drs. Hafidz Asram MM dan ceruk suara NU terus-menerus didedikasikan untuk kemenangan beliau. Setelah beliau menjabat dalam tiga periode, dilakukanlah evaluasi secara menyeluruh ide tentang 'perwakilan' yang berlangsung melalui pemilihan anggota DPD. Di satu sisi, ada kandidat yang terus-menerus memosisikan diri sebagai orang yang dipilih, dan pada saat yang sama jamaah NU diposisikan sebagai ceruk suara yang diperebutkan. Sebagai anggota DPD dari komunitas NU, Drs. Hafidz Asram punya reputasi yang mapan, dan di sisi lain para pemimpin NU juga tidak harus berjuang mati-matian untuk memastikan kader yang diusung akan menang. Implikasinya, pelaksanaan fungsi representasi masih sub-optimal. Kalaulah terlihat, nuansanya adalah representasi identitas daripada representasi kepentingan. Dengan kejelasan posisi NU sebagai ceruk dukungan, baik yang memilih maupun yang dipilih, sama-

sama nyaman. Pada saat itu pula, tokoh yang sudah lama bercokol di DPD RI ini tidak dengan mudah diposisikan sebagai pejuang bagi kepentingan strategis Jamaah/Jamiyyah NU. Perlu upaya ekstra keras dan waktu cukup lama untuk menyediakan pengganti posisinya sebagai representasi NU. Di sinilah keperluan untuk bermusyawaratan untuk menghasilkan wakil yang lebih mudah dikendalikan.

Perlu waktu lebih dari dua tahun untuk memusyawarahkan Gus Hilmi sebagai Wakil NU di DPR RI. Setelah penggalangan gagasan pada level wilayah (provinsi) tuntas, diperlukan serangkaian *road show* ke Majelis Wakil Cabang atau pengurus-pengurus di tingkat kecamatan. Lebih dari itu komunikasi massa dengan kader-kader lapangan dan menjadikan pemilih terkonsolidasi. Peran yang biasanya dijalankan oleh partai politik harus dijalankan oleh NU, agar Gus Hilmi bisa menggantikan posisi Drs. Hafidz Asrom di DPD. Perlu disyukuri bahwa agenda penggantian itu berlangsung dengan baik, dan ada cara baru menjalankan fungsi perwakilan di DPD.

Dari pengalaman berpolitik dan berkomunitas NU tersebut di atas dapat dirasakan bahwa permusyawaratan tidak bisa dipisahkan dengan perwakilan. Tidak mengherankan kalau penulisannya dalam teks resmi adalah 'permusyawaratan/perwakilan'. Kualitas dan ekstensitas musyawarah dalam periode pencalonan dan masa khidmad Hafidz Asram sama sekali berbeda, dan pada akhirnya membuahkan kualitas perwakilan yang berbeda. Justru proses deliberatif yang menyertai perwakilan itulah yang menjadikan kedaulatan rakyat bisa diaktualisasikan, dan hal itu dilakukan untuk NU sebagai jamaah, bukan NU sebagai simpul-simpul ketokohan. Dengan memahami bagaimana permusyawaratan/perwakilan sebagai serangkaian *performative acts*, lebih bisa dipahami bagaimana kedaulatan rakyat hidup sebagai praksis.

PROBING

Kasus pelibatan diri dalam perpolitikan jamaah tersebut di atas membukakan mata bahwa hikmat kebijaksanaan itu manifes dalam praktek, hanya saja kehadirannya harus dihayati secara saksama. Sebagai pembelajar Ilmu Pemerintahan, saya mendapatkan peluang untuk secara diam-diam menyelenggarakan *action research* yang hasilnya saya sajikan di atas. Dengan acuan metodologis ini, tidak relevan pemilahan saya sebagai ilmuwan dengan saya sebagai khodim kyai yang sedang menata kelola jamaahnya. Di luar *text* akademik,

rakyat berkedaulatan tanpa harus menunggu signifikansi administratif karena kedaulatan itupun untuk mereka sendiri.

Game yang berlangsung, sebagaimana saya sifati di atas, membuka ruang pelampiasan. Demokrasi adalah hak, dan pesta pora hak menimbulkan disharmoni. Untuk memastikan artikulasi berbagai kekuatan tersebut *governable*, diberlakukanlah ajaran *rule of law* dan *check and balances*. Sejalan dengan hal itu, berlangsung juga proses mengembangkan *collective self-control*. Repotnya, hal itu berlangsung di bawah permukaan, dan saya mendapatkan *previllage* karena berposisi sebagai pengurus NU.



Kalau alur narasi tersebut di atas dihayati, jelaslah lokus perjuangan dalam berdemokrasi ada di luar diri manusia. Gambar anak-anak tersebut menunjukkan bahwa ketika pandora politik dalam berkedaulatan rakyat dibuka, yang harus dilampiaskan adalah kekuatan 'terhadap', bukan kekuatan 'untuk'. Atas nama demokrasi, kita mengundang partisipasi untuk berkontestasi namun pada saatnya harus mengeluh mengelola kontestasi, ketengan dan konflik. Nalar yang memandu kita dalam berdaulat adalah nalar berebut (menang-kalah), dan semakin banyak semakin baik. Demokrasi menjadi mahal karena adanya biaya untuk memenangkan pertarungan kepentingan. Namun sejalan dengan hal itu berlangsung khitmat (pelibatan diri secara bil hikmah) yang dipimpin pak Kyai, aktualisasi dari, oleh dan untuk rakyat menjadi *governable*.

Dalam kesehariannya, rakyat memiliki caranya sendiri untuk menjalani perannya sebagai pemegang kendali. Kendali itu tidak berada di mana-mana; melainkan di dalam *mindset*, dalam kemampuannya mengendalikan diri. Ada ritus puasa, semedi, taqiroh, dan sejenisnya. Atas dasar itulah pemerintahan sedikit banyak dipimpin oleh hikmah. Kalau

dalam *discursive design* yang disebutkan di atas, kontrol disandarkan pada prosedur dan mekanisme, dalam desain ini ditandai oleh kemampuan menghasilkan situasi paradoksal. Kesediaan untuk menghormati orang lain, justru menuai rasat hormat. Kesediaan untuk berbagi justru mengantarkan dirinya untuk mendapat bagian dari arah yang tidak terduga-duga. Repotnya, *discursive design* yang menunjukkan sentralitas tatanan berporos pada hikmah, kalaulah ada tidak terjangkau oleh *mainstream* metodologi berfikir.

Dengan membuka mata-hati terhadap beroperasinya dua *discursive design* tersebut di atas, kiranya kita bisa membuat telaah yang lebih dingin; tidak hanya mengadopsi visi etik melainkan juga visi etik; dan jika memungkinkan visi emansipatoris. Dalam berkedaulatan rakyat, kita belepotan dengan apa yang kita sebut sebagai *money politics*, dan sulitnya kita keluar dari persoalan ini adalah karena kita tidak menggunakan *discursive design* yang berada di dalam benak pelaku. Yang jelas, kalaulah ada yang merujuk pada keperluan untuk mengadopsi prosedur dan mekanisme, selalu saja ada alur alternatif yang siap ditawarkan.

Dalam konteks ini, kerakyatan adalah artikulasi subjektivitas warga negara sebagai subjek. Justru dengan asah intersubjektivitas sebagai sesama rakyat itulah kita bisa menggolongkan signifikansi politik: berkedaulatan. Agar bisa menghayati dan memahami bagaimana rakyat berkerakyatan, perlu kiranya para pengkaji Ilmu Pemerintahan mencurahkan *empathy* terhadap sesama warga negara. Jika demokrasi sebagai ajaran hendak dipraktikkan, kita perlu camkan setidaknya dua hal. Pertama, kita akan membicarakan kewarganegaraan, di mana kita adalah warga negara itu sendiri. Kedua, betapapun sulit dan rumitnya berada dalam posisi mendisiplinkan negara, ada warga-warga negara yang secara politik disebut juga 'rakyat'.

Ada catatan metodologis yang buru-buru harus disodorkan ke hadapan pengkaji pemerintahan. Baik negara maupun rakyat adalah sebuah abstraksi. Secara keilmuan, konsep-konsep abstrak ini diperlukan agar berbagai kerumitan yang ada bisa disederhanakan. Kalau tidak seksama menggunakan konsep-konsep keilmuan ini, ilmuwan yang menggunakan konsep ini akan terlibat dalam penyesatan. Ada problema yang sudah sejak tahun 1925 dipopulerkan Alfred North Whitehead (1997): problema *fallacy of misplaced concreteness*. Ketika mengabstraksikan negara ataupun rakyat, ada berbagai penampakan konkret yang "terkaburkan", dan ketika menjabarkan konsep-konsep abstrak itu ke tataran yang operasional, konsep operasional itu tidak lagi tepat.

Ketika kita menelaah bagaimana kerakyatan dipraktekkan rakyat, kita dibangunkan oleh alarm metodologis ini. Ada urgensi untuk keluar dari narasi besar (*grand narrative*) yang obsesinya untuk tampil dengan presisi (ontologistik), dan menggesernya ke narasi yang menekankan *sharing* manfaat (lebih aksiologistik). Karena dalam telaah ontologis kita terjebak pada keragaman dan simpang-siurnya makna atau konotasi itulah masing-masing maka kita tidak harus menyamakannya, yang penting memiliki muara yang sama: rakyat dalam kesendiriannya maupun dalam kolektivitasnya mencurahkan kontrol publik. Hanya saja, perlu dicatat bahwa 'kepublikan' yang kita bicarakan tidak harus sama dengan 'kenegaraan'. Dalam masyarakat Indonesia, begitu tebal silang-menyilang artikulasi kepublikan yang tanpa dijangkau oleh negara sekalipun, memiliki manfaat bersama. Sebagai contoh, NU dan Muhammadiyah menyelenggarakan begitu banyak layanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan, dengan atau tanpa bantuan pemerintah/negara. Dengan kerangka telaah seperti itulah, kita bisa melacak berkerakyatan *a la* rakyat.

Untuk bisa menghayati artikulasi rakyat yang berkerakyatan, kita tidak harus memaksakan cara pandang yang Weberianistik. Negara, memang masih bisa dibayangkan sebagai tatanan berbasis otoritas, dan oleh karenanya harus selalu tampil otoritatif. Hanya saja, ada begitu banyak urusan yang tidak harus ditangani dengan mengandalkan otoritas negara. Ada otoritas adat, otoritas agama, otoritas keilmuan yang sama-sama bisa beroperasi, tanpa harus bersilang pendapat.

Kalaulah kita menggunakan lensa telaah Weberian, kita akan temukan kenyataan bahwa di masyarakat ada banyak sekali tatanan yang dalam dirinya sendiri sebetulnya sangat fungsional. Operatornya memang bisa menjadi solusi yang fungsional, hanya saja mereka tidak selalu birokratis/teknokratik. Di sana ada tatanan hierarkis, namun tata kelolanya tidak sama dengan tata kelola birokrasi. Dari balik lensa fikir inilah kita membayangkan pemerintahan tergelar dalam informalitasnya. Dengan begitu maka potensi salah paham dan salah perlakuan (*missplace of concreteness*) karena memaksakan kerangka pikir Weberian bisa diminimalisir.

Untuk menjelaskan hal tersebut di atas, mari kita simulasikan kekacauan yang hanya mau tahu kalau cocok dengan lensa pikir Weberian untuk memahami Desa. Desa adalah lokus strategis dalam mengartikulasikan kedaulatan rakyat. Di manakah posisi desa (dan nama lain yang sejenis) dalam tatanan hirarkis *a la* Weberian? Weberian memosisikan Desa

di lapis paling bawah. Bagaimana *exercise* kedaulatan rakyat bisa dilakukan oleh orang Desa ketika kita polakan berpikir bahwa posisi Desa adalah posisi jelata: bawahan paling bawah. Hal ini menjadikan *exercise* kedaulatan rakyat dari Desa terasa mustahil, kecuali orang/pengkaji desa ini keluar dari *missplacement* ini. Cara berfikir Weberian ini rapi meruntutkan kita berpikir, dan juga begitu kokoh mengerangkeng opsi-opsi yang ada. Kerangka pikir yang memiliki kapasitas begini ini oleh John Dryzek (1990) dan orang-orang se-mahzabnya, disebut sebagai *discursive design*.

Dari simulasi *discursive design* Weberian dalam studi pemerintahan, kita tergiring untuk membayangkan negara adalah organisasi. Karena telah nyaman dengan desain pewacanaan ini, 'negara' kita konkretkan menjadi 'pemerintah', dan hal itu kita konkretkan lagi menjadi birokrasi. Dalam konteks ini, tantangan keilmuan bagi yang hendak memperjuangkan kedaulatan rakyat adalah menerobos, setidaknya terobosan wacana.

Sejumlah terobosan telah dilangsungkan secara praktis, mencoba membalik logika. Sebagai praktisi yang tercerahkan, Wahyudi Anggoro Hadi dalam kapasitasnya sebagai seorang lurah (Kepala Desa) Panggungharjo, Bantul justru memanfaatkan situasi Pandemi Covid-19 tahun ini menyelenggarakan Kongres Kebudayaan, melibatkan eksponen dari berbagai pelosok negeri. Kongres adalah medium organisasional untuk membuat keputusan penting, dan isu yang diusung adalah kebudayaan Desa. Dengan *networking* yang canggih, aktivis yang menggunakan politik sebagai lokasi aktivismenya, menghasilkan rumusan-rumusan penting/berbobot; yang jangkauannya tidak hanya Desa Panggungharjo sendiri melainkan Desa-Desa di seluruh negeri, dan bahkan Desa-Desa di negara-negara di luar negeri.

Hirarki kekuasaan yang sifatnya *top-down*, berhasil diterobos dengan manajemen jejaring dan hubungan kerjanya dengan berbagai pihak (kementerian, kantor kepresidenan, universitas, birokrasi dan lain-lain) bersifat setara. Dengan penuh hormat dan percaya diri, Lurah Wahyudi mengajukan permohonan agar Presiden Joko Widodo membacakan rumusan keputusan kongres. Presiden memenuhi permohonan tersebut melalui disposisi kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Prof. Muhajir Effendi. Kesimpulan-kesimpulan dari *event* tersebut juga masuk sebagai materi pidato Sri Sultan Hamengku Buwono X saat peringatan hari ulang tahun Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Yang jelas, Lurah Wahyudi harus mengusung *discursive design* tersendiri agar

tidak terkerangkeng oleh wacana *mainstream*. Desain diskursif ini bisa menyebar dan terreproduksi ketika wacana-wacana yang digulirkan sudah menjadi praktik dalam berkerakyatan, misalnya memutus rantai korupsi di desanya (Bayo dan Santoso, 2019).

Dibidiknya issue *governabilitas* oleh jurnal ini, akan memiliki dampak praktek lebih dahsyat ketika dibarengi dengan reorientasi pengkajian. Belajar dari Lurah Wahyudi, salah satu kunci dari *governabilitas* adalah berlebarnya praksis dengan visi keilmuan. Untuk menemukan orientasi yang tepat, agar optimal dalam memperjuangkan kedaulatan rakyat, para pengkaji fenomena pemerintahan perlu mengambil hikmah kebijaksanaan, sebagaimana dikukuhkan dalam konstitusi negeri ini. Kedaulatan rakyat bisa terwujud kalau dalam telaahnya ilmuwan yang menekuni ini, lebih dalam dan saksama dalam mengambil hikmah.

Apa yang dilakukan oleh Lurah Wahyudi Anggoro Hadi, adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dipandu oleh hikmah. Hikmah menjadi aktivis, hikmah menjadi santri, serta hikmah menjadi tokoh, memungkinkan dia memimpin Desa Panggunharjo dengan gemilang dan Desa ini menjadi rujukan Desa-Desa lain. Pengkajian dengan cara mengambil hikmah, jelas tidak lazim, setidaknya dicurigai bisa mengganggu objektivitas yang kita jalani. Kalaulah tidak lazim, namun bermanfaat untuk negeri di mana kita adalah warganya. Hal yang terpenting, telaah yang kita sajikan *justifiable*.

Dari paparan tersebut di atas, untuk sementara bisa disimpulkan bahwa kalau kita bisa berilmu sambil mengambil hikmah, ada manfaat aksiologi yang mengedepan. Kita tidak terlalu skeptis dalam menyaksikan bagaimana masyarakat berkedaulatan. Ada berbagai cara berkedaulatan dan cara itu tidak terkodifikasi secara keilmuan karena kebutaan metodologis yang menjangkiti ilmuwan pemerintahan. Dengan begitu, kita bisa ikut mentransformasikan agenda bersama, justru dengan menambatkan nilai kerakyatan dalam cara kita berilmu. Justifikasi tentang hal ini saya sampaikan sebagai komitmen dalam ilmu sosial transformatif (Santoso, 2011).

BERKERAKYATAN BIL HIKMAH: GOVERNANCE SEBAGAI META-POLICY

Sebelum Ilmu Pemerintahan berkontribusi bagi praktek pemerintahan di negeri ini, para ilmunya perlu mengasah kompetensi epistemologis untuk mengembangkan proses keilmuan *bil hikmah*. Hanya saja, tradisi keilmuan sebagaimana dipraktikkan para ahli agama tidak bisa diadopsi secara bulat-bulat. Hal yang terdekat bisa diadopsi adalah metodologi

para agamawan mempraktekkan cara beragama. Berkat kedekatan dengan Kyai, saya bisa beragama sambil menggunakan dan memperbaiki pengetahuan saya sendiri tentang politik, khususnya bagaimana warga negara, baik secara individual maupun secara kolektif berkedaulatan.

Dengan meniti desain perwacanaan yang dipaparkan di atas, Indonesia masih *governable* dan telah memiliki trajektori tersendiri. Terdapat situasi pasang dan surut serta perubahan-perubahan mendadak yang dilangsungkan untuk merespon situasi krisis. Karena krisis-krisis itulah trajektori rakyat Indonesia dalam berkedaulatan lebih tepat digambarkan sebagai patahan-patahan sejarah. Pertama, ada periode di mana kita menjiplak desain demokrasi yang diberlakukan di negara-negara industri. Era itu kita labeli 'demokrasi liberal' yang narasinya dijejali dengan stigma instabilitas dan konflik pemerintahan. Uji coba untuk berdaulat digambarkan dengan pelampiasan penuh nafsu berkuasa, menghasilkan konflik seru, saling memojokkan sekaligus memphlawankan Presiden Sukarno sebagai penengah. Beliau mengeluarkan kiat kepempimpinannya, dan eksperimentasi ini menghasilkan patahan sejarah bernama demokrasi terpimpin. Pada era ini sentralitas figur Presiden Sukarno yang menjaga dengan kontestasi ideologis antar partai politik tidak bisa dilupakan. Perguliran sejarah selanjutnya, justru mengambil pelajaran dari Presiden Sukarno menghasilkan sistem kepemimpinan yang lebih rapi. Pada saat itu, kata 'Orde' mulai dipakai, dan untuk menunjukkan revisi yang hendak dikedepankan, dipopulerkankah istilah Orde Baru yang melabeli kredonya dengan istilah demokrasi Pancasila. Kepemimpinan yang rapi dijabarkan dengan sentralitas militer yang dengan kooptasi-kooptasinya menghasilkan stabilitas dalam kurun waktu lebih dari tiga dasa warsa. Setelah itu, mucullah era baru, bertajuk reformasi, yang sejatinya adalah meneruskan eksperimentasi berdemokrasi liberal. Trajektori di atas bisa dirumuskan tanpa hikmat, tanpa repot-repot berempati pada rakyat sebagai pemilik kedaulatan.

Catatan pelibatan diri di dalam Komunitas NU di DIY menunjukkan bahwa kerakyatan bisa diperbaiki dengan tatakelola jamaah, dan dengan perbaikan tatakelola itu kualitas perwakilan bisa ditingkatkan, dan brutalitas politik sebagai pelampiasan hak bisa dimitigasi. Untuk memagari brutalitas ini memang telah diberlakukan kerangka *check and balance* sebagai kerangka ketatanegaraan, namun masih perlu peredaman politik berbasis penjaminan hak untuk melampiaskan hak ke dalam desain pengendalian diri secara kolektif. Sebagai

policy atas *policy*, *check and balance* bersandingan dengan keharusan arif sebagai metapolicy yang secara teknis dibahasakan sebagai tatakelola jamaah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bayo, Longgina Novadona dan Purwo Santoso. 2019. *Breaking the Chains of Transactionalism: A Village Election without Money Politics in Panggungharjo, PCD [Power, Conflict & Democracy] Journal*, Vol 7, No 2 (2019), diakses dari <https://doi.org/10.22146/pcd.52726>.
- Dryzek, John. 1990. *Discursive Democracy: Politics, Policy, and Political Science*. Cambridge University Press.
- Santoso, Purwo. 2011. *Ilmu Sosial Transformatif*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Gadjah Mada, 19 April 2011.
- Whitehead, Alfred North. 1997. *Science and the Modern World*. The MacMillan Company 1925, Reprinted 1997.
- Yunanto, Sutoro Eko. 2020. *Ilmu Pemerintahan: Anti Pada Politik, Lupa pada Hukum dan Enggan pada Administrasi*. *Governabilitas (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, Volume 1, Nomor 1, Juni 2020.